

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 2

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	JUDUL	METODE PENELITIAN	TEORI DAN KONSEP	KESIMPUNAN PENELITIAN
1	Studi motivasi pengusaha mengikuti pemilu legislatif	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana untuk	Pada penelitian ini menggunakan teori motivasi dari Mc Clelland dan	Hasil penelitian ini menunjukkan Kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat anggota DPRD ternyata adalah salah satu motivasi pengusaha untuk ikut

		<p>mendapatkan data diperlukanya wawancara, observasi dan kajian pustaka untuk mendapatkan data yang valid</p>	<p>kekuasaan Robert Dahl</p>	<p>dalam dunia politik, karena dengan di dapatkanya kekuaasaan mereka menjadi mudah untk mendapatkan keuntungan dari usahanya dan dapat mempengaruhi bebrapa pihak</p>
2	<p>Relasi penguasa pengusaha dalam demokrasi : fenomena rent seeking</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana untuk mendapatkan data diperlukanya wawancara, observasi dan kajian pustaka untuk mendapatkan</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan teori rent seeking</p>	<p>Hasil studi menunjukan bahwa elit (pengusaha) di partai kerap mempertontonkan logika dan cara kerja sesuai dengan kepentinganya. Partai politik dan pengusaha masih suka bekerja di ruang terpisah dalam kedap suara dengan para pemilihnya</p>

		data yang valid		
3	Relasi penguasa dan pengusaha (kajian sosiologi politik masyarakat Sambu Rampas kabupaten Manggarai Timur)	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana untuk mendapatkan data diperlukanya wawancara yang mendalam untuk mendapatkan informasi, observasi dan kajian pustaka untuk mendapatkan data yang valid	Pada penelitian ini menggunakan teori sosiologi politik menurut Mosca dan Karl Max	Pola relasi yang terjadi di kabupaten Sambu Rampas yang sedemikian rupa menimbulkan adanya abnormalitas terhadap hubungan antara penguasa dan pengusaha.

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

Pertama, Skripsi pengusaha dan politik : studi motivasi pengusaha mengikuti pemilu legislatif di kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2019 oleh Dimas Alfarizi mustiko Aji 2019. Penulis menjelaskan bagaimana pengusaha dalam mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2009-2019 dan apa saja yang menjadikan pengusaha tersebut ingin berpartisipasi dalam politik tersebut dan bagaimana cara pengusaha tersebut dapat memperoleh suara dengan terbanyak pada saat pemilihan. Penelitian ini dalam bentuk kualitatif dengan teknik pengumpulan data obeservasi dan wawancara.

Teori yang digunakan yaitu konsep motivasi, kekuasaan, dan teori kebutuhan menurut Mc. Clelland. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki ketika menjabat sebagai anggota DPRD adalah salah satu faktor yang menjadi motivasi pengusaha untuk terjun ke panggung politik, karena dengan memiliki kekuasaan didalam pemerintahan mereka dapat mempengaruhi beberapa pihak untuk usahanya. pada analisisnya ada 90% pengusaha yang ikut dalam pemilihan legislatif di kabupaten Bojonegoro ternyata memiliki keinginan untuk memiliki kekuasaan, mengotrol dan dapat mempengaruhi kebijakan yang ada.

Dengan terpilihnya mereka menjadi anggota legislatif dapat memudahkan usahanya dan juga bisa dengan mudah untuk membuka izin-izin usaha baru yang sedang mereka kerjakan. Tetapi ada juga dari pengusaha tersebut yang tidak mendirikan perusahaan barunya ketika menjabat sebagai anggota DPRD tetapi hanya menggunakan kekuasaanya ketika adanya proyek yang sifatnya sementara, seperti, menyuplai kendaraan ke Exxom Mobile yaitu perusahaan minyak dari

Amerika Serikat. terbukti dari motivasi pengusaha tersebut untuk memiliki panggung di politik adalah motivasi ekonomi yang berkeinginan untuk mempunyai kekuasaan untuk membuat usahanya menjadi lebih besar.

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama tentang pengusaha yang mengikuti pemilihan legislatif, sedangkan pada perbedaannya yaitu terletak pada teori dan lokasi penelitian.

Kedua, *skripsi relasi pengusaha-penguasa dalam demokrasi: fenomena rent seeker pengusaha jadi penguasa* oleh Muhammad Ali Azhar. Menjelaskan tentang adanya mutualisme atau hubungan timbal balik antara penguasa-pengusaha dan parpol. Penelitian ini dalam bentuk studi literatur dan teori yang digunakan adalah Rent Seeker. Hasil studi menunjukkan Partai politik dan pengusaha masih suka bekerja di ruang terpisah dalam kedap suara dengan para pemilihnya.

Munculnya pengusaha yang menjadi penguasa adalah sebuah kebutuhan. Karena di dalam dunia perpolitikan memerlukan uang sebagai kekuatan dan pelicin disaat yang bersamaan agar sesuatu kegiatan dapat berjalan. Karena di dalam demokrasi di Indonesia memerlukan elite partai politik dan para politisi yang jujur dan tidak hanya menggunakan kepemiluan sebagai hal untuk meraih kekuasaan dan hanya mementingkan kepentingan golongan saja. Karena dalam politik elit dari pengusaha ini di dalam partai seringkali memperlihatkan logika dan cara kerjanya.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sam-sama tentang relasi penguasa dan pengusaha dalam pemilihan legislatif, sedangkan pada perbedaanya yaitu terletak pada teori dan lokasinya.

Ketiga, *Relasi penguasa dan pengusaha (kajian sosiologi politik masyarakat Sambu Rampas kabupaten Manggarai Timur) oleh Almulyadi.*

Penelitian ini menjelaskan tentang adanya motif relasi yang dibangun antara penguasa dan pengusaha dengan spontanitas. Teori yang digunakan adalah sosiologi politik menurut Mosca dan Karl Marx. Hasil studi ini menjelaskan tentang Pola relasi yang terjadi di kabupaten Sambu Rampas yang sedemikian rupa menimbulkan adanya abnormalitas terhadap hubungan antara penguasa dan pengusaha, adanya hubungan timbal balik dari pengusaha dan penguasa bahwasanya untuk mendapatkan kemajuan ekonomi maka diperlukanya dukungan dari politik pun sebaliknya politik di presepsikan sebagai timbulnya pendorong kemajuan dalam perekonomian pengusaha.

Tidak hanya dampak negatif tentang masuknya penguasah ke dalam perpolitikan tetapi jug adanya dampak positif diaman terciptanya lapangan pekerjaan baru dan mensejahterakan masyarakat.

Persamaan dari penelitian ini adalah tentang relasi pengusaha dan penguasa, sedangkan perbedaanya yaitu terdapat pada teori dan juga lokasi penelitian.

2.2 Kajian Kepustakaan (Studi Pustaka, Kerangka Teori, atau Teori

Pendukung)

A. Teori Elite Politik

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, dapat dijumpai berbagai perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut, tidak hanya bersifat fisik melainkan terdapat banyak perbedaan lainnya seperti bakat, kekayaan serta keterampilan. Dengan adanya berbagai perbedaan, hal itu kemudian menjadi titik kemunculan kelompok-kelompok yang memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan beberapa kelompok lainnya dikalangan suatu masyarakat.

Dari kelompok yang memiliki keunggulan tersebut, maka terciptalah sebutan elite dikalangan masyarakat. Elite merupakan suatu gabungan dari anggota masyarakat yang tergabung karena memiliki keunggulan diantara masyarakat lainnya. Dalam arti umumnya elite dapat dikatakan sebagai orang atau kelompok-kelompok penting yang berpengaruh atau orang yang terkemuka di masyarakat dan mempunyai power dalam bidang-bidang tertentu.

Elite dibagi menjadi 2 bagian, yakni:

a. Elit Politik Lokal.

Elite politik lokal adalah orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan atau kekuasaan di eksekutif maupun legislatif. Mereka dipilih melalui pemilu atau melalui sebuah proses politik yang dilaksanakan demokratis pada tingkat lokal. Mereka mengisi jabatan politik pada tingkat lokal dan dapat membuat serta menjalankan kebijakan. Misalnya seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ketua DPRD, serta pimpinan partai politik.

b. Elite Politik Non-Lokal.

Elite politik ini adalah orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis serta memiliki kemampuan untuk memerintah orang lain namun dalam cakupan masyarakat lokal. Contoh elite politik ini yaitu elite keagamaan, kepemudaan, elite organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain Terdapat pula perbedaan dari kedua macam elit diatas, perbedaan tersebut terletak pada ruang lingkup masing-masing elit. Dapat dilihat juga penjabaran pada relasi antara elit politik dengan elit masyarakat, dalam proses Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat lokal.²⁰

Menurut pendapat Suzanne Keller, pada awalnya istilah elit digunakan untuk membedakan antara kaum minoritas personal yang ditetapkan untuk melayani suatu kolektivitas dengan proses yang bernilai sosial, dimana pada gilirannya bertanggungjawab kepada implementasi dari berbagai tujuan sosial yang utama serta sebagai kelanjutan tata sosial dengan menyertakan cakupan pada suatu proses sosial yang sedang berjalan maupun berlangsung sementara, hal ini dapat diartikan keduanya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.²¹

Menurut Pareto, ia menyatakan jika dalam masyarakat dipimpin oleh suatu kelompok kecil orang yang memiliki kualitas untuk diperlukan pada kehidupan sosial maupun kehidupan politik. Suatu kelompok kecil

²⁰ANSHORIY, Nasruddin; NASRUDDIN, M. Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan. *Yogyakarta: LKiS*, 2008. Hal, 4. VARMA, S. P. Teori Politik Modern, alih bahasa SM Soemarno, cet. ke-1 Jakarta: CV. 1987.

²¹Suzanne Keller, penguasa dalam kelompok elite :peranan elite dalam masyarakat modern. Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm 3.

itulah yang disebut dengan elit, yang mampu untuk mencangkup sentral kekuasaan. Dengan kata lain, elit merupakan sekelompok orang yang berhasil untuk mengisi jabatan tinggi di dalam lapisan masyarakat, Pareto juga menegaskan jika secara general elit berasal dari kelas yang sama, dimana terdapat sekelompok orang kaya serta pandai memiliki kelebihan pada bidang matematika, bidang music, karakter moral dan lain-lain.

Pareto juga membagi masyarakat kedalam dua kelas, yakni:

- 1) Lapisan atas, yang tidak lain mereka yang disebut Elit. Elit terbagi dalam *Governing Elite* yaitu elit yang memerintah serta *Non-Governing Elite* yaitu elit yang tidak memerintah.
- 2) Lapisan lebih rendah, yaitu masyarakat biasa *non-elite*.²²

Selain itu, terdapat pula pendapat yang dikemukakan oleh Mosca. Menurutny, pada semua lapisan masyarakat, dimulai dari seseorang yang aktif untuk mengembangkan diri hingga mencapai fajar peradaban sampai kepada masyarakat yang paling maju serta kuat pasti selalu terdapat dua kelas, antara lain:

1. Kelas yang memerintah.

Pada kelas ini, biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit serta mempunyai segala fungsi politik, memonopoli suatu kekuasaan dan menikmati hasil keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan tersebut.

²²Muslim Mufti, M.Si., Teori-teori politik. Bandung: Pustaka setia, 2012. Hal, 70

2. Kelas yang diperintah.

Dalam kelompok kelas ini, pada segi jumlah lebih besar daripada kelas yang memerintah. Kelompok pada kelas ini seringkali diatur dan dikendalikan oleh kelas yang memerintah.²³

B. Konsep Relasi Kekuasaan Politik

Dalam pendapat Foucault kekuasaan berada dimana-mana. Keinginan akan kebenaran sama dengan keinginan untuk memiliki kekuasaan (*power*). Akan tetapi, hal yang harus diperhatikan dalam konteks tersebut yaitu, pendapat Foucault mengenai kekuasaan sangat berbeda dengan pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Pada dasarnya, pengertian kekuasaan dipahami serta dibicarakan sebagai kemampuan atau pengaruh yang dimiliki seseorang ataupun suatu lembaga agar memaksakan apa yang dikehendaki kepada pihak lain.

Foucault sendiri memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara memahami kekuasaan, cara pandang Foucault dalam pemahaman kekuasaan terbilang sangat orisinal.²⁴ Foucault berpandangan bahwa kekuasaan tidak dimiliki maupun dipraktekkan pada ruang lingkup dimana terdapat banyak posisi penting yang strategis dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pada penelitiannya, Foucault menyatakan kekuasaan

²³Ibid. Hal, 73

²⁴Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Postkolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 81.

cenderung lebih kepada individu itu sendiri selaku subyek pada lingkup paling kecil.²⁵

Hal tersebut dikarenakan kekuasaan mencangkup tanpa dapat terlokalisasi dan meresap ke dalam dinamika seluruh lapisan sosial. Kekuasaan juga beroperasi, jadi kekuasaan bukanlah hal yang dimiliki oleh sembarang oknum dalam berbagai hubungannya pada bidang pengetahuan atau ilmu dan berbagai lembaga, serta sifat dari kekuasaan yang menormalisasikan susunan-susunan pada masyarakat. Selain itu, tanpa disadari kekuasaan berjalan didalam sistem kesadaran masyarakat. Sebab, kekuasaan itu sendiri tidak berasal dari luar tetapi sesuatu yang menentukan susunan, berbagai aturan serta relasi-relasi tersebut dari dalam.

Menurut Foucault, kekuasaan pasti teraktualisasi melalui pengetahuan karena pengetahuan selalu mempunyai pengaruh kuasa. Bagi Foucault, adanya pengetahuan dapat selalu menciptakan basis dari kekuasaan. Tidak adanya pengetahuan tanpa kekuasaan maupun sebaliknya dimana tidak adanya kekuasaan tanpa adanya pengetahuan. Didalam dinamika masyarakat modern, segala tempat berjalannya kekuasaan juga merupakan tempat pengetahuan. Segala hal tentang pengetahuan memungkinkan serta menjamin berjalannya kekuasaan.

Kehendak untuk mengetahui sesuatu menjadi cara untuk mendominasi berbagai objek dan terhadap manusia. Sebab, dari adanya

²⁵MujiSutrisno, HendarPutranto, *Teori-TeoriKebudayaan*(Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 150.

pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai manusia lainnya. Relasi dari kekuasaan memunculkan adanya keterkaitan antara berbagai pihak, dimulai dari pihak pemegang kekuasaan dengan pihak yang berperan menjadi objek kekuasaan. Kekuasaan juga muncul karena terdapat kemiskinan dan keterbelakangan.

Selain itu, kekuasaan serupa dengan adanya keuntungan yang sepihak baik bagi diri sendiri ataupun untuk suatu kelompok yang diangkat. Seorang penguasa mempunyai kemampuan untuk memainkan suatu peran sosial yang strategis dalam suatu lapisan masyarakat. Terlebih lagi, pada kelimpahan materi yang kurang merata pada lapisan sosial suatu masyarakat. Contohnya, relasi antar kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal. Timbulnya pola ketergantungan yang tidak seimbang itulah yang memunculkan adanya sikap kepatuhan²⁶.

Kekuasaan yaitu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan kehendak yang dicapai menggunakan kekuatan penguasa.

Dalam penelitian ini, pandangan terkait relasi kekuasaan politik yang diutarakan oleh faucolt sangat relevan untuk penulis gunakan dalam melihat kondisi sosial ditengah masyarakat Jakarta yang dimana kondisi ekonomi masyarakat Jakarta masih dibawah rata-rata. Hal ini juga melihat bagaimana

²⁶*Ibid.* Hal, 25

upaya yang dilakukan oleh Purwanto dalam memanfaatkan modal ekonomi yang sangat besar untuk mempengaruhi masyarakat daerah pemilihannya. Kemudian secara khusus teori relasi kekuasaan politik dalam penelitian ini akan memotret berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Purwanto selaku calon legislatif untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya untuk mencari suara serta memperluas relasi kekuasaan politik yang dimiliki oleh Purwanto.

C. konsep power seeking politician model

Perlu kita ketahui bahwa semua konsep kekuasaan ada hubungannya dengan tujuan dan kepentingan. Kekuasaan bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk memperoleh keinginan, dalam memperoleh keinginan diperlukannya sebuah pengaruh oleh karena itu maka kita bisa merubah keadaan.

Menurut Hernando De Soto (1992). Konsep ini menyatakan bahwa untuk meraih kepentingan politik yang berarti adalah jabatan dan kekuasaan. politisi harus menggunakan rasional ekonomi dimana rasional ekonomi dapat memaksimalkan kepentingannya sendiri untuk meraih kekuasaan dan sumber daya pemerintah agar mudah diakses.²⁷

Dalam penelitian ini konsep power seeking dipergunakan untuk melihat bagaimana upaya Purwanto dalam mencari suara politik untuk mendapatkan kekuasaan dengan modal ekonomi yang dia punya. Hal ini juga relevan, karena mengingat konsep power seeking dimana aktor

²⁷ Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm 67

pengusaha mencari kekuasaan dengan kemampuan ekonomi yang dia punya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penulis mencoba mengajukan skripsi tentang relasi penguasa dan pengusaha dalam pemilu legislatif, yang mana kita ketahui bahwasanya banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah mapan dan dengan perekonomian yang cukup ingin ikut ke dalam panggung politik. disini bisa kita lihat bahwa dengan perekonomian yang cukup tidak membuat orang puas karena belum adanya kekuasaan di tangan mereka.

Maka dari itu mereka membuat relasi antara pengusaha dan politik untuk mendapatkan *feedback* atau umpan balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, atau ada terselipnya kepentingan pribadi dalam relasi tersebut. Namun ada juga hal yang dikhawatirkan jika pada struktur politik tidak adanya saling kontrol antara lembaga-lembaga politik tersebut dan berakhir tidak berjalan dengan semestinya maka yang akan terjadi selanjutnya adalah mandatnya aspirasi rakyat hanya untuk keperluan bisnis semata.

Tabel 3

Kerangka pemikiran

